

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

#### 2.1 Tinjauan Pustaka

Menurut Borden dan Abbot dalam Manzilati (2017) tinjauan pustaka merupakan suatu proses meletakkan, mendapatkan, membaca, dan mengevaluasi literatur penelitian yang berkaitan dengan ketertarikan dari peneliti. Sebuah tinjauan pustaka bertujuan untuk mengidentifikasi dan menyoroti tema yang relevan dan mendokumentasikan temuan, kerangka kerja, dan atau instrumen penting dari penelitian sebelumnya yang akan berfungsi sebagai dasar untuk proyek saat ini (Sekaran & Bougie, 2016). Kajian pustaka yang komprehensif akan mampu mengorganisir landasan penelitian saat ini berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya. Suatu penelitian idealnya akan menjawab suatu pertanyaan, yang dikenal dengan "*research question*". *Research question* sebaiknya harus membahas topik yang relevan dan penting serta memberikan kontribusi teoritis potensial untuk sebuah literatur (Stockemer, 2019).

Tinjauan pustaka penelitian ini mencakup landasan teori-teori yang berkaitan tentang pendapatan asli daerah pariwisata, jumlah wisatawan, jumlah hotel, jumlah restoran, dan *dummy* (Covid-19). Selain itu, pada tinjauan pustaka menguraikan pula penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini dengan demikian dapat merumuskan hipotesis dan model penelitian.

##### 2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu modal dalam keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Hal tersebut disebabkan

PAD akan menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, yaitu sebagai pelayanan publik dan pembangunan ekonomi.

#### **2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya (Carunia, 2017).

Salah satu upaya dalam melihat kemampuan suatu daerah dari segi keuangannya dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada. Semakin besar komposisi PAD, artinya semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar. Tetapi semakin kecil komposisi PAD terhadap penerimaan daerah maka ketergantungan terhadap pusat semakin besar. Dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan PAD adalah kelancaran proses pembangunan. Pembangunan yang dimaksud meliputi berbagai sektor diantaranya kemudahan akses infrastruktur seperti jalan, jembatan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lainnya (Handayani, 2017).

#### **2.1.1.2 Sumber-sumber Penerimaan Daerah**

Suatu daerah dimana masing-masing pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan jalan

melaksanakan pembangunan di segala bidang. Peran pemerintah daerah dalam pembangunan daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa PAD tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintah daerah. Adapun sumber-sumber penerimaan daerah terdiri dari:

#### A. Pendapatan Asli Daerah

##### 1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun jenis pajak menurut wilayah pemungutannya dibagi menjadi:

##### a. Pajak Provinsi

Pajak provinsi adalah salah satu jenis pajak daerah. Pajak provinsi merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dimana kewenangan pemungutan ada pada pemerintah provinsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, jenis pajak provinsi dibagi menjadi:

##### 1) Pajak Kendaraan Bermotor;

- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- 4) Pajak Air Permukaan; dan
- 5) Pajak Rokok.

b. Pajak Kabupaten/Kota

Adapun khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, maka jenis pajak yang dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota. Jenis-jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari:

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 7) Pajak Parkir;
- 8) Pajak Air Tanah;
- 9) Pajak Sarang Burung Walet;
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

## 2. Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah, retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran dari jasa dan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah demi kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Carunia (2017) retribusi daerah adalah iuran daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Peningkatan retribusi daerah yang memiliki potensi yang baik akan meningkatkan PAD, retribusi yang diterima oleh pemerintah daerah digunakan untuk membiayai kembali pembangunan daerah yang bersangkutan.

Meskipun demikian, tidak semua jasa yang disediakan pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menjadi objek retribusi daerah adalah:

### a. Retribusi Jasa Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan dan diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah sebagai berikut:

- 1) Retribusi pelayanan kesehatan;
  - 2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
  - 3) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil;
  - 4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
  - 5) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
  - 6) Retribusi pelayanan pasar;
  - 7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
  - 8) Retribusi alat pemadam kebakaran;
  - 9) Retribusi penggantian biaya cetak peta;
  - 10) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
  - 11) Retribusi pengolahan limbah cair;
  - 12) Retribusi pelayanan terulang;
  - 13) Retribusi pelayanan pendidikan; dan
  - 14) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
- b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan yang menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan atau pelayanan oleh pemerintah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). Adapun jenis-jenis retribusi jasa usaha yaitu:

- 1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- 2) Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan;
- 3) Retribusi tempat pelelangan;
- 4) Retribusi terminal;
- 5) Retribusi tempat khusus parkir;
- 6) Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
- 7) Retribusi rumah potong hewan;
- 8) Retribusi pelayanan ke pelabuhan;
- 9) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
- 10) Retribusi penyebrangan di air; dan
- 11) Retribusi penjualan produksi usaha daerah.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Adapun jenis-jenis retribusi perizinan tertentu diantaranya:

- 1) Retribusi izin mendirikan bangunan;
- 2) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
- 3) Retribusi izin gangguan;
- 4) Retribusi izin trayek; dan
- 5) Retribusi izin usaha perikanan.

### 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan suatu susunan kegiatan dan tindakan yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, dan perubahan status hukum serta penatausahaannya. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan meliputi bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara. Adapun jenis-jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD;
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah atau BUMN; dan
- c. Bagian laba atas penyertaan modal milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

### 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan asli daerah yang sah adalah hasil pendapatan daerah yang didapat dari usaha diluar kegiatan dan pelaksanaan tugas daerah (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999). Adapun jenis pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- b. Jasa giro;
- c. Pendapatan bunga;

- d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
- e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah;
- f. Penerimaan keuntungan dan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- g. Pendapatan denda atas pelaksanaan keterlambatan pekerjaan;
- h. Pendapatan denda pajak;
- i. Pendapatan denda retribusi;
- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- k. Pendapatan dari pengembalian;
- l. Fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
- n. Pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan (Peraturan Daerah, 2007).

#### B. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Perencanaan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Pada umumnya dana perimbangan merupakan bagian terbesar dalam pembiayaan kegiatan pemerintah daerah. Tujuan utama dana perimbangan adalah untuk mengatasi apabila terjadi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, kesenjangan fiskal antar pemerintah daerah, perbaikan sistem perpajakan, dan

koreksi ketidakefisienan fiskal (Santoso dan Suparta, 2015). Adapun dana perimbangan dibedakan menjadi:

1. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak, terdiri atas:
  - a. Pajak Bumi dan Bangunan;
  - b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
  - c. Pajak Penghasilan Pasal 25 dan 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPH Pasal 21.
2. Dana Alokasi Umum.
3. Dana Alokasi Khusus.
4. Dana Perimbangan Provinsi.

C. Pendapatan Daerah Yang Sah.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan yang meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang/jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri. Sementara itu pendapatan dana darurat merupakan pinjaman pemerintah dari APBN kepada pemerintah daerah untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan peristiwa tertentu yang tidak dapat ditanggulangi APBD (Samudra, 2015).

### **2.1.2 Pariwisata**

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat menunjang pengembangan suatu wilayah. Menurut hasil riset World Bank menyatakan bahwa sektor pariwisata merupakan penyumbang yang paling mudah untuk devisa dan

pendapatan domestik bruto (PDB) suatu negara. Oleh karena itu sektor pariwisata kini menjadi primadona dalam pembangunan nasional.

#### **2.1.2.1 Pengertian Pariwisata**

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Menurut Marsono (2016) pariwisata merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kepariwisataan, termasuk pengembangan objek dan daya tarik wisata, serta usaha-usaha lain yang berkaitan dengan bidang pariwisata. Pariwisata secara sederhana dapat didefinisikan sebagai perjalanan seseorang atau sekelompok orang dari satu tempat ke tempat lain membuat rencana dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan rekreasi dan mendapatkan hiburan sehingga keinginannya terpenuhi (Prayogo, 2018).

#### **2.1.2.2 Pengertian Wisata**

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009). Dari pengertian wisata tersebut mengandung unsur sementara dan perjalanan itu seluruhnya atau sebagian bertujuan untuk menikmati objek wisata bukan untuk mencari nafkah.

### **2.1.2.3 Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Pariwisata**

#### **2.1.2.3.1 Jumlah Wisatawan**

Menurut Organisasi Wisata Dunia (WTO) wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan ke sebuah daerah atau negara asing dan menginap minimal 24 jam atau maksimal enam bulan di tempat tersebut. Menurut Suryadana dalam Luntungan (2020) seseorang bisa dikatakan wisatawan jika dia melakukan perjalanan dengan mengunjungi tempat-tempat tertentu dengan tujuan berlibur, berbisnis, berolahraga, berobat, dan bahkan menuntut ilmu.

Banyaknya jumlah wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah wisata tertentu menjadi salah satu bukti bahwa daerah tersebut mempunyai daya tarik wisata yang besar. Adapun menurut Irmah (2017) jenis wisatawan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Wisatawan domestik adalah penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan di wilayah Indonesia di luar tempatnya berdomisili, dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 24 jam atau menginap kecuali kegiatan yang mendatangkan nafkah di tempat yang dikunjungi.
2. Wisatawan mancanegara adalah orang yang melakukan perjalanan wisata di luar negerinya dan wisatawan di dalam negerinya.

Menurut Cohen dalam Pitana dan Diarta (2009) suatu daerah tujuan wisata yang dikunjungi wisatawan dapat dipandang sebagai pelaku konsumen sementara. Apabila wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisatawan tersebut sangat banyak, maka pengeluaran konsumsi untuk membeli berbagai kebutuhan selama liburannya akan memberikan dampak pada roda kehidupan ekonomi di daerah

tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun dampak yang berpengaruh terhadap kondisi sosial dan ekonomi tersebut antara lain:

1. Dampak terhadap penerimaan devisa negara;
2. Dampak terhadap harga-harga;
3. Dampak terhadap kesempatan kerja;
4. Dampak terhadap pendapatan masyarakat;
5. Dampak terhadap distribusi manfaat/keuntungan;
6. Dampak terhadap kepemilikan dan kontrol;
7. Dampak terhadap pembangunan pada umumnya; dan
8. Dampak terhadap pendapatan pemerintah.

Menurut Austriana (2005) berbagai macam kebutuhan wisatawan selama melakukan perjalanan wisata akan menimbulkan terjadinya gejala konsumtif terhadap produk-produk yang berada di daerah tujuan wisata tersebut. Dengan adanya kegiatan konsumtif tersebut maka akan memperbesar peluang pendapatan yang diterima oleh pemilik usaha industri pariwisata dari kegiatan transaksi atas jasa pelayanan yang diterima oleh wisatawan. Hal tersebut nantinya akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan retribusi bagi pemerintah daerah tujuan wisata setempat yang merupakan komponen dari PAD pariwisata. Misalnya pajak atas pelayanan hotel, pajak restoran, hiburan ataupun retribusi lainnya di industri pariwisata.

Peranan industri pariwisata dalam perekonomian merupakan mata rantai yang sangat panjang sehingga banyak menampung kesempatan kerja bagi masyarakat sekitarnya. Sektor ini juga akan menyebabkan pendapatan masyarakat

di daerah tujuan wisata meningkat dari hasil penjualan barang dan jasa (Gorica, 2010).

#### **2.1.2.3.2 Jumlah Hotel**

Hotel merupakan suatu usaha yang menggunakan bangunan atau sebagian dari padanya yang khusus disediakan, dimana setiap orang dapat menginap dan makan serta memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan pembayaran. Menurut Sulastiyono (2011) hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian khusus.

Pada zaman dahulu fungsi hotel hanya sebagai sarana bermalam bagi orang yang melakukan kegiatan wisata dan atau melakukan perjalanan bisnis. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu hotel mengalami perluasan fungsi yang diakibatkan oleh perubahan perilaku konsumen seperti digunakan untuk acara pernikahan, rapat perusahaan, *launching* produk baru suatu perusahaan, dan tak jarang digunakan pula untuk sarana berakhir pekan bagi masyarakat menengah atas. Adapun untuk jenis hotel berdasarkan fasilitas dan persyaratannya terbagi menjadi dua, yaitu:

##### **1. Hotel Bintang**

Hotel bintang adalah suatu usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, dan setiap orang dapat menginap, makan serta memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan

pembayaran dan telah memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang seperti yang telah ditentukan oleh Dinas Pariwisata Daerah (DIPARDA). Adapun ciri tertentu dari hotel berbintang adalah mempunyai restoran yang berada di bawah manajemen hotel tersebut.

## 2. Hotel Non-Bintang

Hotel non-bintang adalah suatu usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, dimana setiap orang dapat menginap, makan serta memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan pembayaran dan belum memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang tetapi telah memenuhi kriteria sebagai hotel melati yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata Daerah (DIPARDA). Menurut Sutrisno (2013) pengelolaan hotel dilakukan secara komersial dengan memberikan fasilitas penginapan untuk masyarakat umum dengan fasilitas sebagaimana berikut:

- a. Jasa penginapan;
- b. Pelayanan makanan dan minuman;
- c. Pelayanan barang bawaan;
- d. Pencucian pakaian; dan
- e. Penggunaan fasilitas perabot dan hiasan-hiasan yang ada di dalamnya.

Jumlah hotel dapat diartikan sebagai jumlah akomodasi yang dapat digunakan oleh wisatawan untuk menginap yang dikelola secara komersial. Berkaitan dengan penerimaan pajak maka sedikit banyaknya jumlah hotel akan dapat menentukan besar kecilnya penerimaan pajak daerah. Hal ini dikarenakan

jumlah penerimaan pajak hotel ditentukan dari besarnya tarif pajak yaitu 10% dari total pendapatan hotel. Maka dari itu semakin banyak jumlah hotel maka akan semakin banyak menarik minat masyarakat untuk menginap dan juga semakin banyak pula pajak yang disetorkan kepada pemerintah.

### **2.1.2.3.3 Jumlah Restoran**

Restoran adalah suatu tempat dan organisasi secara komersial yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua tamunya berupa makanan dan minuman. Restoran ada yang berada di suatu hotel, kantor maupun pabrik, dan banyak juga yang berdiri sendiri diluar bangunan itu (Marsum, 2005).

Restoran juga tidak kalah penting untuk menggalakkan wisata kuliner di sebuah daerah. Menurut Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tercantum dalam pasal 1 ayat 23 menyebutkan pengertian restoran adalah penyedia atau penjual makanan dan atau minuman dengan pemungutan pembayaran, misalnya rumah makan, kafetaria, kantin, warung dan termasuk di dalamnya jasa boga atau *catering*.

Peran pariwisata baik terhadap restoran maupun hotel untuk tempat menginap tentunya saling berkaitan jika dilihat dari perjalanan wisatawan yang lebih dari satu tujuan, sehingga membutuhkan fasilitas untuk beristirahat selain itu tentu juga membutuhkan tempat penyediaan makanan dan minuman salah satunya restoran. Restoran menjadi tujuan wisata untuk menikmati aneka makanan lokal yang mempunyai ciri khas suatu daerah. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran (Arjana, 2015).

Dengan semakin banyaknya jumlah restoran akan menghasilkan pajak restoran yang termasuk jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya komponen pendukung yaitu sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah. Objek pajak restoran adalah jasa yang telah dilaksanakan oleh restoran berupa jasa yang disediakan oleh restoran seperti jasa penjualan makanan atau minuman yang dibeli oleh pembeli, baik yang dikonsumsi di tempat tersebut ataupun di tempat lainnya.

Menurut Soekresno (2000) dilihat dari sistem pengelolaan dan sistem penyajiannya, sebuah restoran dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu:

1. *Formal Restaurant* (Restoran Formal)

Restoran formal merupakan industri jasa pelayanan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial dan profesional dengan pelayanan yang eksklusif. Adapun yang termasuk restoran formal adalah:

- a. Sistem penyajian yang dipakai adalah *russian service / french service* atau modifikasi dari kedua *table service* tersebut.
- b. Para pelanggan terikat dengan menggunakan pakaian formal.
- c. Penerimaan pelanggan dengan sistem pesan tempat terlebih dahulu.
- d. Tidak menyediakan pelayanan untuk makan pagi.
- e. Menu pilihan yang disediakan adalah menu klasik.
- f. Harga makanan dan minuman relatif tinggi daripada harga makanan dan minuman di restoran informal.
- g. Tersedia ruang *cocktail* selain ruangan jamuan makan.
- h. Menyediakan hiburan musik hidup.

- i. Menyediakan berbagai merek minuman bar secara lengkap.
- j. Penataan bangku dan kursi memiliki area pelayanan yang lebih luas untuk dilewati *gueridon*.
- k. Tenaga relatif banyak dengan standar kebutuhan satu pramusaji untuk melayani 4-8 pelanggan.

## 2. *Informal Restaurant* (Restoran Informal)

Restoran informal adalah industri jasa pelayanan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial dan profesional dengan lebih mengutamakan kecepatan pelayanan, kepraktisan dan percepatan frekuensi pelanggan yang silih berganti. Adapun klasifikasi dari restoran informal adalah:

- a. Penerimaan pelanggan tanpa sistem pemesanan tempat
- b. Pelanggan yang datang tidak terikat untuk mengenakan pakaian formal.
- c. Sistem penyajian makanan dan minuman yang dipakai adalah *american service / ready plate* bahkan *self-service* ataupun *counter-service*.
- d. Daftar menu disimpan langsung di setiap meja makan untuk mempercepat proses pelayanan.
- e. Menu yang disajikan sangat terbatas dan membatasi menu-menu yang relatif cepat selesai dimasak.
- f. Harga makanan dan minuman relatif lebih murah.
- g. Tidak menyediakan hiburan musik hidup.
- h. Penataan meja dan bangku cukup rapat antara satu dengan yang lain.
- i. Jumlah tenaga *service* relatif lebih sedikit dengan standar kebutuhan satu pramusaji untuk melayani 12-16 pelanggan.

### 3. *Specialties Restaurant*

*Specialties restaurant* adalah industri jasa pelayanan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial dan profesional dengan menyediakan makanan khas dan diikuti dengan sistem penyajian yang khas dari negara tertentu. Kriteria dari *specialties restaurant* adalah:

- a. Menyediakan pelayanan untuk makan siang atau makan malam.
- b. Menyediakan sistem pemesanan tempat.
- c. Menyediakan menu khas suatu negara tertentu, populer dan disenangi banyak pelanggan secara umum.
- d. Sistem penyajian disesuaikan dengan budaya negara asal dan dimodifikasi dengan budaya internasional.
- e. Menu *ala-carte* dipresentasikan oleh pramusaji ke pelanggan.
- f. Harga makanan relatif tinggi dibanding restoran informal dan lebih rendah dibanding formal restoran.
- g. Menghadirkan musik atau hiburan khas negara asal.
- h. Jumlah tenaga *service* sedang, dengan standar kebutuhan satu pramusaji untuk melayani 8-12 pelanggan.

#### 2.1.2.3.3 *Dummy (Covid-19)*

Menurut World Health Organization (2020) *coronavirus* merupakan suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis *coronavirus* diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti *middle east respiratory syndrome* (MERS) dan *severe acute respiratory syndrome* (SARS).

*Coronavirus* jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit Covid-19, sedangkan Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. Covid-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia.

Pandemi Covid-19 menyebabkan dunia masuk dalam kondisi krisis baik krisis kesehatan maupun krisis ekonomi. Akibat dari virus ini tentu berimbas pada sektor pariwisata yang mana diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (*lockdown*). Menurut Petersen, Pollack & Madoff (2014) dalam buku *Anomalia Covid-19*, seseorang dapat tertular Covid-19 melalui berbagai cara diantaranya:

1. Kontak jarak dekat dengan penderita Covid-19 misalnya bersentuhan atau berjabat tangan.
2. Tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita Covid-19.
3. Memegang mulut dan hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air liur penderita.
4. Virus corona akan menginfeksi siapa saja. Akan tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan lebih fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang sedang sakit atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah.

### **2.1.3 Elastisitas**

#### **2.1.3.1 Pengertian Elastisitas**

Dalam ilmu ekonomi, elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan perubahan variabel lainnya. Menurut Arsyad (1996) elastisitas merupakan persentase perubahan kuantitas yang diminta sebagai akibat dari perubahan nilai salah satu variabel yang menentukan sebesar satu persen. Elastisitas menunjukkan tanggapan dari satu variabel bebas karena adanya perubahan dalam variabel terikat.

#### **2.1.3.2 Elastisitas Permintaan**

Elastisitas permintaan merupakan pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang diminta atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang. Besar kecilnya perubahan tersebut dinyatakan dalam koefisien elastisitas atau angka elastisitas. Secara umum elastisitas permintaan dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu:

a. Elastisitas harga

Elastisitas harga merupakan elastisitas yang menunjukkan derajat kepekaan jumlah produk yang diminta terhadap perubahan harga. Elastisitas harga sering disebut juga elastisitas permintaan karena perubahan harga.

b. Elastisitas pendapatan

Elastisitas pendapatan yaitu elastisitas yang menunjukkan perubahan relatif dari jumlah barang yang diminta konsumen sebab adanya perubahan pendapatan.

c. Elastisitas silang

Elastisitas silang didefinisikan sebagai tanggapan terhadap jumlah barang yang diminta apabila terjadi perubahan harga pada barang lain yang mempunyai hubungan dengan barang tersebut atau persentase perubahan jumlah barang yang diminta oleh konsumen akibat dari perubahan harga barang lain dalam satu persen.

### 2.1.3.3 Sifat Elastisitas Permintaan

Menurut Sugiarto dkk (2002) terdapat tiga jenis sifat elastisitas permintaan, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Permintaan elastis ( $E_d > 1$ )

Permintaan komoditas dikatakan elastis jika jumlah komoditas yang diminta mengalami perubahan dengan persentase yang melebihi persentase perubahan harga. Jika terjadi perubahan harga sebesar 1% maka akan menyebabkan perubahan jumlah permintaan lebih dari 1%.

b. Permintaan *unitary* ( $E_d = 1$ )

Perubahan harga komoditas dalam suatu persentase tertentu akan diikuti dengan perubahan jumlah komoditas yang diminta tersebut dalam persentase yang sama (umumnya dalam arah yang berlawanan), sehingga nilai mutlak bagi kedua nilai tersebut adalah satu.

c. Permintaan *inelastis* ( $E_d < 1$ )

Permintaan komoditas dikatakan inelastis jika jumlah komoditas yang diminta kurang peka terhadap perubahan harga. Jika terjadi perubahan harga

sebesar 1% menyebabkan perubahan jumlah komoditas yang diminta kurang dari 1%.

#### 2.1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu kajian yang menguraikan hubungan antar variabel penelitian berdasarkan pendapat dan hasil penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi atau jurnal penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No.	Judul dan Penulis	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pengaruh Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Barat (Tahun 2013-2016) (Abdurahman Habibie Alghifari, 2018)	Jumlah wisatawan dan jumlah hotel terhadap PAD pariwisata.	Tingkat penghunian kamar dan rata-rata lama menginap.	1) Jumlah wisatawan serta jumlah hotel dan akomodasi memiliki pengaruh positif dan signifikan 2) Tingkat penghunian kamar dan rata-rata lama menginap tamu berpengaruh negatif dan tidak signifikan. 3) Secara simultan jumlah wisatawan domestik dan asing, jumlah hotel dan akomodasi, tingkat penghunian kamar dan jumlah rata-rata lama menginap berpengaruh signifikan terhadap PAD Provinsi Jawa Barat periode tahun 2013-2016.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Analisis Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Empiris pada Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2018) (Dita Novita Dewi dan Suyatmin Waskito Adi, 2021)	Jumlah wisatawan dan jumlah hotel terhadap PAD pariwisata.	Jumlah wisata	1) Jumlah wisatawan berpengaruh positif dan tidak signifikan. 2) Jumlah obyek wisata tidak berpengaruh signifikan. 3) Jumlah hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah sektor pariwisata.
3.	Pengaruh Kunjungan Wisatawan, Penerimaan Pajak Hotel, Restoran dan Pendapatan Retribusi Objek Wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bangli Periode 2009-2015. (Ida Bagus Agastya Brahaman Wijaya, I Ketut Suidiana, 2017)	Jumlah kunjungan wisatawan terhadap PAD pariwisata.	Penerimaan pajak hotel dan restoran dan pendapatan retribusi objek wisata.	1) Jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh terhadap retribusi obyek wisata. 2) Kunjungan wisatawan, pajak hotel restoran dan retribusi obyek wisata berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.
4.	Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata di Kabupaten Bantul Tahun 2014;1-2017;12 (Tiara Intan Mustika, 2019)	Jumlah hotel dan jumlah restoran terhadap PAD pariwisata.	Jumlah pengunjung wisata, jumlah obyek wisata, dan PDRB.	1) Jumlah pengunjung wisata tidak signifikan terhadap PAD pariwisata. 2) Jumlah obyek wisata, PDRB, dan jumlah restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD pariwisata. 3) Jumlah hotel penginapan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PAD pariwisata.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	Analisis Pengaruh Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah (Tahun 2012-2016) (Luqman Yumna Fauzi, 2018)	Jumlah wisatawan terhadap PAD pariwisata.	PDRB perkapita, jumlah penduduk dan jumlah objek wisata	1) Secara parsial PDRB per kapita, jumlah penduduk, jumlah obyek wisata berpengaruh positif terhadap PAD. 2) Jumlah wisatawan berpengaruh negatif terhadap PAD.
6.	Analisis Kontribusi Peran Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2018. (Febriani Indah Nur Hikmawati, 2019)	Jumlah hotel dan jumlah wisatawan terhadap PAD.	Jumlah objek wisata dan PDRB.	1) Jumlah hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. 2) Jumlah wisatawan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PAD. 3) Jumlah obyek wisata berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PAD. 4) PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di 35 kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah.
7.	Analisis Determinan PAD Sub Sektor Pariwisata di DIY Periode 2012-2017. (Afifah Tessa Sekar Nusa dan Rifki Khoirudin, 2020)	Jumlah kunjungan wisatawan, dan jumlah hotel terhadap PAD pariwisata.	Jumlah objek wisata dan jumlah biro perjalanan.	1) Jumlah wisatawan dan jumlah hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD sub sektor pariwisata. 2) Jumlah objek wisata dan jumlah biro perjalanan wisata tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD sub sektor pariwisata.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.	Analisis Perkembangan Pariwisata di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. (Anak Agung Gede A. A. P. dan I Made Jember, 2020)	Jumlah kunjungan wisatawan terhadap PAD pariwisata.	Jumlah kamar hotel dan rata-rata lama menginap.	1) Jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara, jumlah kamar hotel, dan rata-rata lama menginap secara simultan berpengaruh terhadap PAD. 2) Jumlah kunjungan wisatawan, jumlah kamar hotel, dan rata-rata lama menginap secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.
9.	Pengaruh Kunjungan Wisatawan dan Jumlah Restoran terhadap PAD dan Progres Ekonomi di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2014-2018. (Manalu, Simon Patar Rizki., dkk 2019)	Jumlah Wisatawan dan Jumlah Restoran terhadap PAD.	Progres Ekonomi.	1) Jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. 2) Jumlah restoran berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap PAD.
10.	Analisis Pengaruh Jumlah Obyek Wisata, Jumlah Hotel, Jumlah Restoran dan Rumah Makan, terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2015. (Naning Widiyanti dan Diah Setyawati Dewanti, 2017).	Jumlah hotel dan jumlah restoran dan rumah makan terhadap PAD.	Jumlah wisata, PDRB.	1) PDRB, jumlah hotel, jumlah restoran dan rumah makan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD sektor pariwisata. 2) Jumlah obyek wisata tidak signifikan terhadap PAD sektor pariwisata.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11.	Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Sub Sektor Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2016. (Affan Nurhadi, 2018).	Jumlah wisatawan, jumlah restoran dan rumah makan terhadap PAD.	PDRB dan Jumlah Biro Perjalanan	1) PDRB dan jumlah wisatawan secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap PAD. 2) Jumlah biro perjalanan wisata, restoran, dan rumah makan tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.
12.	Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Sektor Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Tahun 2000-2015. (Lia Noviana, 2016).	Jumlah hotel dan jumlah wisatawan terhadap PAD pariwisata.	PDRB dan jumlah penduduk.	1) PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD sektor pariwisata, 2) Jumlah hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD sektor pariwisata. 3) Jumlah wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD sektor pariwisata. 4) Jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PAD sektor pariwisata.
13.	Analisis Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Pariaman. (Yulie Suryani, 2017)	Jumlah wisatawan terhadap PAD pariwisata.	Sarana pariwisata dan objek wisata	1) Sarana pariwisata berpengaruh positif signifikan terhadap PAD. 2) Objek wisata berpengaruh positif signifikan terhadap PAD. 3) Jumlah wisatawan berpengaruh positif signifikan terhadap PAD.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
14.	Pengaruh Hotel dan Restoran terhadap Pajaknya Dampaknya Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Barat. (Sigit Sanjaya dan Ronni Andri Wijaya, 2020)	Jumlah Restoran penerimaan serta pada Asli Sumatera	Jumlah hotel dan jumlah restoran terhadap PAD pariwisata.	Pajak hotel dan pajak restoran.	1) Jumlah hotel berpengaruh signifikan positif terhadap PAD pariwisata Sumatera Barat 2) Jumlah restoran berpengaruh signifikan positif terhadap PAD pariwisata Sumatera Barat
15.	Analisis Jumlah Kunjungan Wisatawan, Jumlah Objek Wisata Hotel dan Penduduk Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018. (Deby Lyana Dewi dkk, 2020)	Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Jumlah Objek Wisata Hotel dan Penduduk Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018.	Jumlah kunjungan wisatawan, jumlah hotel terhadap pariwisata.	Jumlah penduduk dan jumlah objek wisata.	1) Jumlah kunjungan wisatawan, jumlah objek wisata, jumlah hotel, dan jumlah penduduk secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana suatu teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Maka secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Selain itu juga perlu dijelaskan mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian. Pertautan antar variabel tersebut selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian. Oleh sebab itu maka pada setiap penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka berpikir (Sugiyono, 2017).

### **2.2.1 Hubungan Jumlah Wisatawan terhadap PAD Pariwisata**

Peningkatan jumlah wisatawan domestik dan mancanegara baik secara langsung maupun tidak langsung mempunyai hubungan positif terhadap pendapatan asli daerah pariwisata. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan ketika jumlah wisatawan meningkat dan pihak swasta serta pemerintah sebagai pihak yang mengelola lalu merespon positif terhadap sektor pariwisata dengan melakukan pembenahan akan lebih meningkatkan jumlah wisatawan sehingga berdampak pada peningkatan penerimaan PAD pariwisata.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian Raga Amanda (2015) bahwa jumlah wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Pada penelitian ini diasumsikan semakin banyak pengunjung ke lokasi-lokasi wisata dapat menggerakkan sektor riil perekonomian daerah karena beberapa pelaku jasa dan usaha di daerah mendapatkan peluang untuk menjual jasa atau produknya.

Selain itu menurut penelitian yang dilakukan oleh Jefri Tri Aprilianto dan Susilo (2016) bahwa jumlah wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Hal ini dikarenakan semakin banyak wisatawan yang datang maka konsumsi terhadap produk pariwisata akan semakin meningkat sehingga kontribusi sektor pariwisata juga ikut meningkat dan memperbesar PAD.

Hasil penelitian lain memperkuat penelitian sebelumnya yakni penelitian Melinda Eka Putri (2020) bahwa jumlah wisatawan berpengaruh signifikan terhadap PAD sub sektor pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta. Semakin banyaknya jumlah wisatawan dan dengan semakin lama wisatawan berada atau tinggal di daerah tujuan wisata, maka akan semakin banyak pula uang yang akan

dibelanjakan mereka untuk kebutuhan konsumsi. Hal ini tentunya dapat meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata.

### **2.2.2 Hubungan Jumlah Hotel terhadap PAD Pariwisata**

Hotel merupakan suatu bangunan yang berupa kamar-kamar dan dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum, serta hiburan dan fasilitas penunjang hotel lainnya. Pada masa sekarang ini fungsi hotel bukan hanya sebagai tempat penginapan saat berwisata ke suatu daerah tetapi hotel juga dapat digunakan untuk pertemuan yang berkaitan dengan urusan pekerjaan, mengadakan seminar, menjalankan kegiatan bisnis ataupun hanya sekedar untuk mencari ketenangan. Jumlah hotel mempunyai hubungan positif terhadap PAD pariwisata, karena apabila jumlah hotel meningkat maka penerimaan dari pajak hotel akan ikut meningkat.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Noviana (2016) jumlah hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD sektor pariwisata di Gunungkidul. Dengan adanya hotel serta restoran di sekitar obyek wisata tentu akan menyerap banyak tenaga kerja karena tersedianya lapangan kerja, serta berimbas juga terhadap peningkatan PAD sektor pariwisata melalui sektor pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nussa (2020) jumlah hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD sub sektor pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut dikarenakan dengan bertambahnya bangunan hotel di Daerah Istimewa Yogyakarta maka akan meningkatkan PAD sub sektor pariwisata melalui pajak hotel.

Hasil penelitian lain dari Melinda Eka Putri (2020) jumlah hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD karena perhotelan memiliki peran dalam pergerakan pembangunan daerah dan sangat perlu untuk dikembangkan secara baik dan optimal sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, PAD, penyerapan tenaga kerja serta perluasan sektor usaha.

### **2.2.3 Hubungan Jumlah Restoran terhadap PAD Pariwisata**

Jumlah restoran merupakan jumlah penyedia jasa penjualan makanan atau minuman yang sangat dibutuhkan oleh wisatawan. Jumlah restoran mempunyai hubungan positif terhadap PAD. Hal ini dikarenakan restoran sebagai penyedia jasa penjualan makanan atau minuman yang sangat dibutuhkan oleh wisatawan dalam memenuhi kebutuhan pokok selama mengunjungi objek wisata akan berpengaruh terhadap pajak restoran yang nantinya akan meningkatkan PAD sektor pariwisata.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Widiyanti (2017) jumlah restoran mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD sektor pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut disebabkan dalam melakukan perjalanan wisata, makanan dan minuman sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok wisatawan. Sehingga wisatawan akan berusaha memenuhi kebutuhannya salah satunya dengan makan di rumah makan atau restoran. Tentunya hal tersebut akan meningkatkan pendapatan pariwisata dari sektor penerimaan pajak.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Mustika (2019) jumlah restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD pariwisata. Jumlah restoran yang semakin meningkat mengakibatkan PAD pariwisata juga semakin meningkat, sebaliknya apabila jumlah restoran menurun maka PAD pariwisata akan mengalami

penurunan. Tingginya minat wisatawan yang ingin berkunjung daerah tujuan wisata memerlukan makanan dan minuman sebagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, sehingga keberadaan restoran dan rumah makan memang harus disediakan di setiap obyek wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan menunjang PAD pariwisata.

Hasil penelitian lain dari Sanjaya & Wijaya (2020) jumlah restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD. Perkembangan jumlah restoran di suatu daerah dapat mencerminkan dinamika perkembangan pariwisata di daerah tersebut. Dengan meningkatnya jumlah restoran maka pendapatan asli daerah berpotensi untuk meningkat melalui penerimaan pajak. Selain itu, restoran juga merupakan penghubung dengan jasa lain yang berkontribusi seperti perdagangan dan transportasi dalam peningkatan PAD.

### **2.2.3 Hubungan *Dummy* (Covid-19) terhadap PAD Pariwisata**

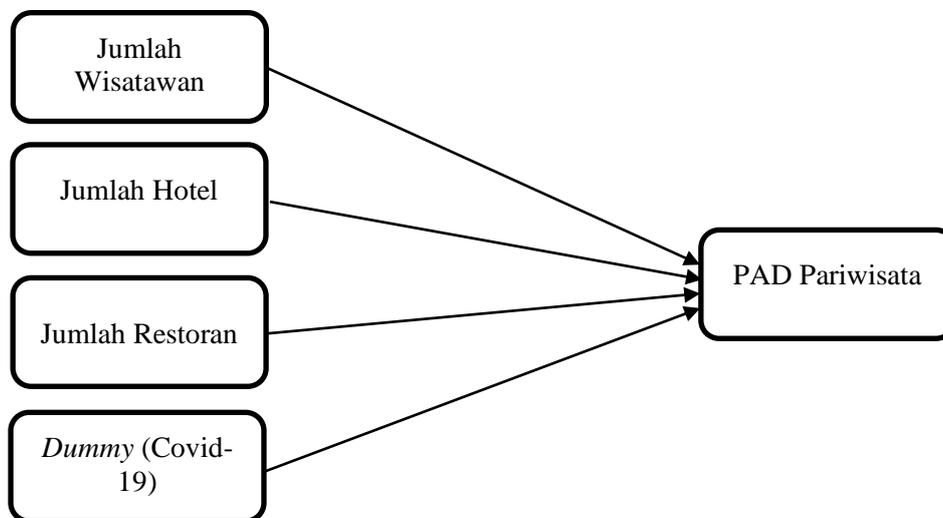
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Adityo Susilo (2020) *coronavirus* merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut *coronavirus 2* (Sars-Co V-2). Penyakit yang mudah menular dan mematikan yang terinfeksi virus ini telah mewabah di hampir seluruh dunia. Dengan melihat banyaknya kasus infeksi Covid-19 di Indonesia, diperkirakan dampak lokal dari penyebaran Covid-19 justru akan jauh lebih besar.

Berbagai sektor industri di Indonesia baik itu pariwisata, pertambangan, konstruksi, jasa keuangan, otomotif, transportasi juga UMKM mengalami penurunan akibat Covid-19. Diberlakukannya kebijakan-kebijakan seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar membuat mobilitas masyarakat menurun cukup

signifikan sehingga masyarakat harus bekerja dan belajar dari rumah hingga ditutupnya tempat ibadah dan tempat wisata untuk sementara.

Secara umum Covid-19 memiliki pengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah pariwisata. Salah satu yang dampaknya adalah menurunnya keinginan masyarakat untuk melakukan kegiatan wisata juga pergi ke tempat hiburan. Selain itu masih banyak dampak negatif Covid-19 terhadap perekonomian.

Lebih jelasnya mengenai kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

### 2.3 Hipotesis

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran, maka dalam kajian penelitian ini dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial jumlah wisatawan, jumlah hotel, dan jumlah restoran, berpengaruh positif sedangkan *dummy* (Covid-19) berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah pariwisata di Priangan Timur tahun 2016-2021.

2. Diduga secara bersama-sama jumlah wisatawan, jumlah hotel, jumlah restoran, dan *dummy* (Covid-19) berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pariwisata di Priangan Timur tahun 2016-2021.